

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Tujuan
 Indikator Tujuan
 Tugas

: Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
 : Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)
 : Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula/ Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyampaian KUA PPAS ke DPRD	Waktu Penyampaian RAPBD – Waktu Penyampaian Rancangan KUA PPAS ke DPRD	Bidang Anggaran Daerah
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai Ketentuan	Bidang Anggaran Daerah
		Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM)	Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM yang memenuhi syarat verifikasi/lolos pengujian.	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kriteria yang harus dipenuhi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan Sistem Pengendalian Internal 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan 4. Kecukupan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula/ Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	$\frac{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi}}{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan}} \times 100$	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyampaikan Ranperda APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda APBD}} \times 100$	Bidang Anggaran Daerah
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100$	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pekanbaru, Maret 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



INDRA, SE, M.Si, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721115 199803 1 004